BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menangani permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Budong-budong, yaitu:

1. Sosialiasasi:
    a. Penyamaan persepsi terkait anak tidak sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah merupakan langkah penting untuk menyatukan pemahaman dan tanggung jawab semua pihak. Melalui pertemuan dan diskusi bersama, upaya ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah secara lebih terarah dan berkelanjutan.
    b. Sosialisasi melalui media dan kegiatan ke sekolah masih kurang optimal, karena lebih berfokus pada pendataan tanpa diimbangi penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Diperlukan strategi sosialisasi yang intensif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak agar masyarakat memahami manfaat pendidikan.
    c. Kerja Sama Lintas Sektor: Pemerintah daerah aktif melibatkan tokoh adat, pemuka agama, aparat desa, kepala sekolah, hingga orang tua siswa dalam pelaksanaan

sosialisasi. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan agar pesan pentingnya pendidikan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat dan menjadi strategi efektif dalam upaya menekan angka anak putus sekolah.

d. Penyediaan Akses Pendidikan Alternatif: Sosialisasi juga mengenalkan program pendidikan alternatif seperti Kampung Belajar, layanan pendidikan nonformal, dan program beasiswa bagi anak-anak putus sekolah. Program ini bertujuan menjangkau anak-anak yang sulit mengakses pendidikan formal akibat keterbatasan fasilitas maupun faktor geografis.

2. Pemberian bantuan dana pendidikan:

a. Program Indonesia Pintar (PIP): Pemberian bantuan dana pendidikan melalui program PIP menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan menekan angka anak putus sekolah serta memastikan hak pendidikan dasar terpenuhi.

b. Program Beasiswa KUAAT: Selain PIP, pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa KUAAT yang menyasar anak-anak putus sekolah dan keluarga prasejahtera. Meskipun pelaksanaan program ini dinilai cukup membantu, namun masih ditemui kendala dalam pendataan dan besaran dana

bantuan yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pendidikan anak di daerah terpencil.

3. Gerakan kembali sekolah (Taki Sola):
    a. Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah dan Beasiswa: Program Gerakan Kembali Sekolah (Taki Sola) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk mengajak anak putus sekolah kembali bersekolah. Selain memberikan motivasi, program ini menyediakan fasilitas seperti perlengkapan sekolah, beasiswa, dan keringanan biaya pendidikan.
    b. Pendampingan terhadap Siswa yang Dikembalikan ke Sekolah: Pemerintah daerah membentuk tim pendamping dan melakukan kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program. Upaya ini bertujuan memastikan anak-anak yang kembali ke sekolah mendapat pendampingan secara psikososial dan fasilitas belajar yang memadai.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditarik, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memaksimal peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah, yaitu:

1. Membentuk tim percepatan penanganan anak putus sekolah lintas sektor

    Membentuk tim percepatan penanganan anak putus sekolah lintas sektor merupakan upaya strategis yang melibatkan berbagai instansi

dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan anak putus sekolah secara terintegrasi. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, pemerintah desa, sekolah, PKBM, Puskesmas, serta tokoh masyarakat setempat. Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, tim ini bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, penyaluran bantuan pendidikan, hingga pendampingan bagi anak-anak yang kembali bersekolah. Kehadiran tim percepatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka anak putus sekolah sekaligus memastikan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan terpenuhi secara adil dan merata.

2. Melaksanakan Pendataan Anak Putus Sekolah Secara Periodik hingga keTingkat Dusun

   Pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan pendataan anak putus sekolahdilakukan secara berkala dan terstruktur, dengan melibatkan pemerintah desa dan aparat dusun guna memperoleh data yang akurat dan valid sebagai dasar perumusan kebijakan.

3. Meningkatkan Intensitas Sosialisasi Pendidikan Berbasis Desa

   Program sosialisasi pendidikan harus ditingkatkan secara rutin di tingkat desa dan dusun,dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, serta kader pendidikan desa untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak.

4. Mengembangkan Program Kampung Belajar sebagai Alternatif Layanan Pendidikan di Wilayah Sulit Akses

Pemerintah daerah dapat menginisiasi program Kampung Belajar yang menyediakan layananpendidikan non-formal dan bimbingan belajar di desa-desa terpencil, sebagai solusi bagi anak-anak yang mengalami kendala untuk bersekolah di lembaga formal, sekaligus sebagai wadah peningkatan literasi masyarakat.

C. Produk Tesis

Luaran dari tesis ini adalah sebuah produk berupa *Policy Brief* dengan judul "**Anak-Anak, Pendidikan, dan Masa Depan Mamuju Tengah: Siapa Peduli?**". *Policy Brief* ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maupun pihak terkait dalam perumusan kebijakan penanganan anak putus sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar di wilayah Kecamatan Budong-budong.